

BAB IV

KONSTRUKSI PEMIKIRAN DAN ANALISIS

A. Konstruksi Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Modernisasi Pesantren

Sang pluralis itu (Gus Dur) sangat getol membuka cakrawala pesantren. Sudah wajar jika pada 15 Desember 2000 lalu, karena jasa-jasa mengembangkan demokrasi dan sistem pendidikan di Indonesia, terutama di pesantren-pesantren, ia mendapatkan gelar doktor kehormatan di bidang teknologi dan komunikasi oleh Akademika Institut Teknologi Asia (AIT), Bangkok, Thailand. Namun sangat disayangkan amat sedikit orang yang mengetahui pembacaan Gus Dur terhadap tradisi pesantren. Tampaknya, hitungan jari sudah cukup untuk mengklarifikasinya. Pandangan-pandangan Gus Dur tentang tradisi pesantren. Sebagian mungkin sudah tahu betul bahwa Gus Dur merupakan tonggak utama (pengurup-urip; jawa) pesantren di negeri ini. Dengan jasa-jasa Gus Dur, pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memiliki potensi plus.¹

Pemikirannya yang pluralis, kontroversial, dan mempunyai pandangan jauh ke depan tidak bisa dielakkan mempunyai andil yang besar dalam pembangunan masyarakat di Indonesia, lebih-lebih pada sebuah institusi pendidikan Islam yang juga mempunyai akar yang berbeda-beda.

¹ Faisol, *Gus Dur dan Pendidikan Islam; Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan Di Era Global*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011)

Institusi pendidikan Islam; dalam hal ini Pesantren adalah sebuah kehidupan yang unik, sebagaimana dapat disimpulkan dari gambaran lahiriahnya. Pesantren adalah sebuah komplek dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan disekitarnya. Dengan pola kehidupan yang unik tersebut pesantren mampu bertahan selama berabad-abad untuk mempergunakan nilai-nilai kehidupannya sendiri, yang oleh Gus Dur disebut sebagai subkultur.²

Namun gelombang modernisasi yang melanda seluruh penjuru dunia dewasa ini, mengakibatkan pengendali pesantren tidak lagi terisolasi secara kultural. Demikian pula para ustadz dan santri. Modernisasi seolah-olah menyadarkan kalangan pesantren melihat bayangannya sendiri sebagai institusi pendidikan yang serba ketinggalan. Untuk itu, pesantren harus melakukan respon terhadap modernisasi jika tidak mau ditinggal oleh peminatnya. Selain itu, sebagai “sub kultur” pesantren memiliki dua tanggung jawab secara bersamaan, yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam dan sebagai bagian integral masyarakat yang bertanggung jawab terhadap perubahan rekayasa sosial. Hal inilah yang nampaknya disadari Gus Dur, sehingga lahirlah gagasan untuk memodernisasi pendidikan pesantren.

Modernisasi pesantren merupakan proses perubahan pesantren kearah penyempurnaan keadaan. Kata modernisasi sebenarnya masuk dalam kandungan kata dinamisasi. Yang mana dinamisasi pada dasarnya mencakup dua buah

² Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta:LKiS, 2010). Cet. III, hlm. 1-3.

proses, yaitu penggalan kembali nilai-nilai hidup positif yang telah ada, selain mencakup pula pergantian nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru yang dianggap lebih sempurna. Proses pergantian nilai itulah yang disebut Modernisasi.³

Kata dinamisasi dalam penggunaannya memiliki konotasi “perubahan kearah penyempurnaan keadaan”, dengan menggunakan peralatan dan sikap hidup yang telah ada. Dalam kerangka modernisasi pendidikan pesantren, harus didasari dan dimotori oleh semangat tradisionalitas yang selama ini melekat erat di pesantren.

Proses dinamisasi suatu lembaga kemasyarakatan, lebih-lebih pesantren merupakan usaha yang sangat rumit dan membutuhkan waktu. Tidak ada satu konsep pun yang dapat disusun tanpa mengalami perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya kemudian. Dengan demikian tidak akan ditemukan konsep final yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Yang dikemukakan sekedar gagasan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk memulai proses dinamisasi secara berencana, hanya bersifat langkah permulaan tanpa ditunjukkan perinciannya.

Untuk dapat mengemukakan suatu konsep yang relevan bagi kebutuhan pesantren, kita harus mengetahui terlebih dahulu garis besar situasi yang dihadapi oleh pesantren di tengah kondisi dunia yang luas dan penuh dengan persaingan global. Situasi kejiwaan yang secara faktual dirasakan oleh pesantren

³ *Ibid*, hlm.53.

dewasa ini adalah meluasnya rasa tak menentu, yang biasanya disebut sebagai keadaan rawan. Kondisi kejiwaan semacam ini menurut Gus Dur, sebagai akibat dari *pertama*, pantulan kondisi masyarakat yang serba transisional. *Kedua*, kesadaran akan terbatasnya kemampuan pesantren mengatasi tantangan dan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Ketiga*, statisnya struktur sarana-sarana fisik yang ada untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan pesantren baik manajemen maupun material, dan *keempat*, sulitnya mengajak masyarakat pendukung pesantren menuju arah hidup yang lebih serasi dengan kebutuhan pesantren.⁴

Hal ini apabila dibiarkan berlarut-larut, akan membuat pesantren semakin kesulitan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Seiring perkembangan masa yang terus melaju meninggalkan siapa saja yang tidak mampu mengikutinya akan membuat pesantren jauh tertinggal serta semakin memperberat kadar dan ruang lingkup tantangan tersebut. Manifestasi keadaan ini adalah semakin meluasnya cetusan frustrasi yang mendambakan penyelesaian. Dalam pada itu ada dua reaksi yang timbul dari keadaan rawan di pesantren, yaitu:⁵

Reaksi pertama berbentuk menutup diri dari perkembangan umum masyarakat luar, terutama dari kegiatan yang mengancam kemurnian kehidupan beragama. Isolasi ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada akses yang

⁴ *Ibid*, hlm.53-54.

⁵ *Ibid*, hlm, 55.

berarti dengan dunia luar. pesantren tipe ini akan tenggelam dalam impian kejayaan masa lampau, serta dalam kegiatan memaksakan unuran-ukuran masa lampau itu kepada masyarakat. Reaksi kedua justru mempergiat proses penciptaan solidaritas yang kuat antara pesantren dan masyarakat. Penggalan proses ini disertai pula oleh sikap hidup menonjolkan hal-hal modern secara lahiriyah (pseuo-modernism).

Dengan menyadari kondisi ini maka dibutuhkan konsep perbaikan yang relevan bagi kebutuhan pesantren, melalui strategi dasar yaitu meyakinkan pesantren keadaan rawan ini dapat mereka atasi dengan melaksanakan proyek-proyek perbaikan yang bersifat selektif dan bertahap.

Dalam penggarapan proyek tersebut, dibuat penggolongan menurut kelompok masing-masing. Secara umum penggolongannya adalah:⁶

1. kelompok pembinaan pimpinan pesantren yang dititik beratkan kepada pengembangan pola-pola kepemimpinan pesantren yang lebih sesuai dengan kepentingan pesantren dimasa depan. Program latihan kepemimpinan dan juga penyusunan pola-pola peremajaan pimpinan bagi pesantren adalah beberapa diantara proyek-proyek yang dapat digolongkan kedalam kelompok ini.
2. kelompok pembinaan mutu pengajara dipesantren, yang meliputi: penyusunan kurikulum yang lebih relevan bagi kebutuhan masyarakat, penyusunan silabus, penataran bagi tenaga pengajar,

⁶ *Ibid*, hlm.61-62.

penyediaan alat-alat pengajaran yang lebih memadai bagi kebutuhan.

3. Kelompok pembinaan pola-pola hubungan pesantren dengan lembaga kemasyarakatan yang lainnya, meliputi pola-pola hubungan dengan lembaga keagamaan diluar Islam, lembaga-lembaga pengembangan dan penelitian di berbagai lapangan serta lembaga pemerintah.
4. Kelompok pembinaan keterampilan bagi para santri, baik meliputi pendidikan kejuruan tehnik maupun pendidikan karakter yang mampu menyanggah bebanpenyebaran ide keterampilan itu sendiri dengan baik.

Selanjutnya untuk mengemukakan tentang bagaimana seharusnya proses dinamisasi itu berlangsung perlu adanya langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, perlu adanya perbaikan keadaan di pesantren yang di dasarkan pada regenerasi kepemimpinan yang sehat dan kuat. Yakni dengan cara pergantian pimpinan secara bertahap dan teratur, yang memungkinkan penumbuhan nilai-nilai baru dalam kehidupan pesantren secara konstan, dengan mengikutkan pemimpin muda dalam pesantren secara berangsur-angsur. Dengan demikian diharapkan akan mampu menciptakan perpaduan antara kebutuhan-kebutuhan praktis akan kemajuan dan antar tradisi keagamaan yang mereka warisi dari generasi sebelumnya. *Kedua*, perlu adanya persyaratan yang melandasi terjadinya proses dinamisasi tersebut. Persyaratan meliputi rekonstruksi bahan-bahan pengajaran ilmu agama dalam skala besar-besaran, dari tingkat dasar

sampai perguruan tinggi. Dalam hubungan ini ia mengatakan bahwa kitab-kitab kuno dan kitab-kitab pengajaran modern seperti yang dikarang oleh Mahmud Yunus dan Hasbi Ash-Shiddiqi telah kehabisan daya dorong untuk mengembangkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap ajaran agama. Dengan kata lain kitab-kitab klasik dan kitab-kitab modern yang ada selama ini, menurut Gus Dur sudah tidak relevan lagi untuk di kaji. Inilah yang melandasi gagasan-gagasan pemikiran Gus Dur tentang perlunya melakukan reorientasi dan rekonstruksi terhadap semua sistem pendidikan pesantren dengan cara mengambil nilai-nilai baru, tanpa meninggalkan pokok-pokok ajaran agama yang kita warisi selama ini. Selain itu Gus Dur menekankan pentingnya mengatasi problem internal eksternal yang ada di pesantren, sehingga ia tetap eksis di masa mendatang.⁷

Demikianlah gagasan Gus Dur mengenai dinamisasi pesantren yang didalamnya tercakup pula proses modernisasi. Selanjutnya untuk melakukan perubahan dalam pendidikan pesantren —sebagai respon terhadap modernisasi— Gus Dur berpendapat setidaknya pesantren harus mengawali dan menekankan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pesantren dan Sekolah Umum

Mengenai gagasan Abdurrahman Wahid pada pesantren untuk mendirikan sekolah umum, bukan merupakan hal baru sebab gagasan tersebut sudah pernah dilakukan pertama kali oleh K.H A. Wahid Hasyim ayahnya, di

⁷ *Ibid*, hlm. 63-64.

lingkungan pesantren Tebuireng. Jadi bisa dikatakan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pengintegrasian sekolah umum ke dalam pesantren merupakan warisan ayahnya. Menurut Wahid Hasyim sistem pendidikan pesantren yang hanya berkuat pada masalah keagamaan dengan pola ajar *wetonan* dan *bandongan* harus segera dirubah dan disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat.⁸

Lebih lanjut Wahid Hasyim mengemukakan, bahwa memadukan ilmu-ilmu agama dengan pengetahuan umum sangatlah penting dan perlu dilakukan mengingat mayoritas santri mesti memiliki kemampuan lain agar lebih dapat mengembangkan potensi diri. Hal tersebut cukup beralasan karena dalam kenyataannya, sistem pendidikan agama yang paling eksklusif sekalipun, tidak semua siswanya dapat dicetak menjadi ulama.⁹ Senada dengan sang ayah namun Gus Dur lebih filosofis kenegarawanan dan lebih kompleks dalam mengemukakan alasannya, dimana Gus Dur memiliki keinginan besar terciptanya perubahan fundamental dalam dunia pendidikan kita, yaitu integrasi antara pendidikan umum dan pendidikan agama yang secara birokratik menyuguhkan praktek-praktek diskriminatif dalam penanganannya.

⁸ Dari sinilah Wahid Hasyim kemudian berinisiatif mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu umum dalam kurikulum pengajaran pesantren. Sistem ajar *wetonan* dan *bandongan* diubah dan dikembangkan dengan diterapkannya sistem madrasah atau klasikal. Kemudian sistem klasikal tersebut oleh Wahid Hasyim dipadukan dengan unsur ilmu agama dan ilmu umum di pesantren. Uji coba itupun berhasil dan berdiri dengan nama madrasah Nidzamiyah. Lihat Muhammad Rifai, *Wahid Hasyim; Biografi Singkat*, (Yogyakarta: Garasi, 2009) hlm. 51-52.

⁹ *Ibid*, hlm.53.

Selain itu pengintegrasian sekolah umum ke dalam pesantren akan berpengaruh kepada kelangsungan pesantren itu sendiri. Zamakhsyari Dhofier melaporkan bahwa kebanyakan pesantren kecil mati pada 1950-an. Salah satunya penyebabnya dikarenakan kebijakan pemerintah yang mengembangkan sekolah umum seluas-luasnya, akibatnya anak muda yang belajar di pesantren menurun sebab lebih memilih pendidikan sekolah umum. Pesantren-pesantren besar dapat bertahan, tetapi hanya dengan memasukkan lembaga-lembaga pendidikan umum di dalamnya.¹⁰

Selain masalah eksistensi dan esensi pendirian sekolah umum lembaga pendidikan pesantren, Memasukkan sekolah umum ke dalam pesantren akan mendorong penambahan jumlah siswa di pesantren, hal ini disebabkan *pertama*, mayoritas warga pesantren yang tidak belajar di madrasah, akan dapat diserap sekolah umum. *Kedua*, mereka yang selama ini berada dalam persimpangan antara mempelajari ilmu agama di pesantren dan sekolah umum bisa masuk ke pesantren sekaligus masuk sekolah umum yang ada di lingkungan pesantren itu.¹¹

Walaupun sebagian pesantren telah menerima dan mendirikan sekolah umum, namun anggapan yang selama ini ada bahwa pesantren yang bertugas

¹⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm.75.

¹¹ Hilangnya jumlah konflik kejiwaan yang selama ini mengakibatkan ratusan ribu siswa yang terkatung-katung tidak sekolah dan tidak pula masuk pesantren, dengan pemecahan sederhana ini, akan berarti penambahan besar-besaran dalam populasi anak didik pesantren, yang pada gilirannya berarti pula penambahan anak didik yang berpendidikan formal di Negara kita secara keseluruhan. Lihat Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi . . .*, hlm.67.

mencetak ulama' atau ahli agama menjadikan sebagian pesantren masih enggan untuk dapat menerima mendirikan sekolah umum, hal ini menurut Gus Dur diakibatkan oleh dua hal: *pertama*, tidak sesuainya sekolah umum tersebut dengan tujuan keagamaan yang dimiliki pesantren, yaitu bahwa pendidikan pada dasarnya dimaksudkan untuk menyebarkan, mempertahankan dan memperkuat ajaran serta peradaban Islam. *Kedua*, ketidak mampuan pesantren mengelola sekolah umum, hal ini disebabkan pesantren belum memiliki tenaga ahli yang cakap, terampil dan sesuai dengan kebutuhan pembaruan untuk mengajarkan cabang-cabang pengetahuan umum. Kedua sebab ini masih ditunjang pula oleh eksklusifitas Departemen Agama (kemenag) sebagai klien pesantren selama ini, selain hampir-hampir tidak ada hubungannya dengan kemendiknas dari jenjang teratas hingga ke aparat terbawah.¹²

Keberatan pertama dapat diatasi dengan menunjukkan kenyataan bahwa dalam sistem pendidikan agama yang paling eksklusif sekalipun, tidak semua siswanya dapat dicetak menjadi seorang ahli agama atau ulama'. Dengan masuknya sekolah umum dalam pesantren, siswa sekolah umum bisa diberikan pendidikan agama sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang diatur berjenjang sesuai dengan jenjang sekolah umum yang mereka lalui. Sedangkan bagi mereka yang berkeinginan menjadi ulama', masih terbuka kesempatan untuk sepenuhnya mempelajari ilmu-ilmu agama, baik dalam bentuk pendidikan formal di madrasah maupun dalam bentuk pengajian sebagai pendidikan non formal.

¹² *Ibid* hlm.68.

Adapun keberatan kedua, sebenarnya adalah hasil dari perwujudan rasa rendah diri dikalangan pesantren sendiri, adalah sikap yang tidak mendasar sama sekali. Dengan melalui penyesuaian dan peningkatan cara kerja, pesantren tentu akan dapat mengemban amanat pengelolaan itu dengan baik. Bahkan sikap hidup berswadaya, idealisme moral, dan kebiasaan hidup serba sederhana, yang selama ini menjadi karakteristik kehidupan pesantren, akan menyerap kedalam kehidupan sekolah umum di negara kita ini, dalam jangka panjang pengelolaan pesantren atas sekolah umum dalam lingkungannya justru akan memperbaiki pengarahannya kualitatif bagi kehidupan sekolah umum di tanah air secara menyeluruh.¹³

Bagaimanapun juga, tuntutan untuk mengembangkan pengetahuan non agama (pengetahuan umum) merupakan suatu kebutuhan nyata yang harus dihadapi lulusan pesantren di masa depan, yang mana menuntut dimilikinya landasan yang kuat dalam bidang rohani, juga akan ditentukan oleh penguasaan dan perkembangan teknologi.

Tujuan pengembangan pesantren dengan mengintegrasikan pendidikan umum dan pengetahuan agama adalah harapan bagi lulusan yang dihasilkan akan memiliki suatu kepribadian yang utuh dan bulat, yang menggabungkan dalam dirinya unsur-unsur keimanan yang kuat dan penguasaan atas pengetahuan secara berimbang.¹⁴

¹³ Wahid, *Menggerakkan Tradisi . . .* hlm.69-70.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.185-186.

2. Pengembangan Kurikulum Pesantren

Kurikulum pendidikan Islam sejauh ini seakan kurang begitu relevan dengan kondisi zaman dalam perspektif kontekstual sebab fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkesan pendidikan Islam hanya berusaha mengembangkan metode pembelajaran mengenai aspek keagamaan saja (aspek ubudiyah) yang sifatnya vertikal, sementara aspek horizontal (muamalah) kurang begitu diperhatikan yang sifatnya horizontal.

Menurut Gus Dur, kurikulum yang berkembang di pesantren selama ini memperlihatkan sebuah pola yang tetap. Pola tersebut dapat diringkas ke dalam pokok-pokok berikut: a) kurikulum ditujukan untuk mencetak ulama' dikemudian hari; b) struktur dasar kurikulum itu adalah pengajaran pengetahuan agama dalam segenap tingkatannya dan pemberian pendidikan dalam bentuk bimbingan kepada santri secara pribadi oleh kiai/guru; dan c) secara keseluruhan kurikulum yang ada berwatak lentur dan fleksibel, dalam artian santri berkesempatan menyusun kurikulumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.¹⁵

Dari sini Gus Dur berpendapat perlunya pesantren melakukan perubahan kurikulum yang lebih integrative. Santri perlu diberikan bukan hanya ilmu-ilmu yang terkait dengan ritual keseharian yang bersifat praktis-pragmatis, melainkan juga harus dibekali ilmu-ilmu yang berbau pengetahuan umum. Namun sebelumnya Gus Dur mensyaratkan perlu adanya upaya standarisasi kurikulum

¹⁵*Ibid.*, hlm. 145.

pesantren baik yang berskala lokal, regional maupun nasional. Menurut Gus Dur, sistem pendidikan di pesantren masih belum memiliki kesamaan dasar di luar penggunaan buku-buku wajib (*kutub al-muqarranah*) yang hampir bersamaan. Keragaman ini timbul sebagai akibat dari ketidaksamaan dalam sistem pendidikannya, dimana ada pesantren dengan sistem pendidikan berupa pengajian tanpa sekolah/madrasah, ada pesantren yang hanya menggunakan sistem pendidikan madrasah secara klasikal, dan sistem pesantren yang menggabungkan antara keduanya. Oleh karenanya, masih menurut Gus Dur, bahwa tidak mungkin ada penyatuan kurikulum di antara pondok pesantren selama masih adanya perbedaan-perbedaan cukup besar dalam sistem pendidikan yang dianut.¹⁶

Namun tidak semua pesantren sepatat dengan standarisasi kurikulum pesantren. Sebaliknya variasi kurikulum pesantren justru diyakini lebih baik. Muhammad Tholchah Hasan misalnya, sebagai alumni pesantren dan sekarang telah menjadi kiai, tidak tertarik dengan penyamaan kurikulum. Biarlah pesantren tetap dengan kekhususan-kekhususan (*tahasus-tahasus*) mereka sendiri, sebab jauh lebih baik daripada harus disamakan. Adanya variasi kurikulum pada pesantren akan menunjukkan cirri khas dan keunggulan masing-masing.¹⁷

¹⁶ *Ibid.* hlm.160.

¹⁷ Mujamil Qomar, *Pesantren* . . . hlm. 122.

Hal tersebut disadari betul oleh Gus Dur, untuk itu pembakuan yang dimaksud adalah menciptakan beberapa model kurikulum sederhana yang memungkinkan lembaga pendidikan yang menyelenggarakannya disebut sebagai pondok pesantren, terlepas dari atau tidaknya sistem madrasah didalamnya. Kepentingan pembuatan model-model kurikulum itu adalah untuk menyediakan tingkatan ilmiah minimal bagi pengetahuan agama di pondok pesantren. Dengan tercapainya tingkatan minimal itu, pondok pesantren bersangkutan dapat memasukkan unsur-unsur pendidikan non-agama ke dalam kurikulumnya tanpa membahayakan kelestarian tugas pokok pesantren sebagai pengemban ilmu-ilmu agama yang dilandasi oleh ketiga unsur iman, Islam, dan ihsan. Salah satu penghambat utama bagi penerimaan mata pelajaran non-agama di sementara pondok pesantren selam ini adalah ketakutan akan semakin hilangnya fungsi pengembangan ilmu agama ini. Padahal, tanpa ilmu agama yang tertuang dalam kurikulum yang bulat, alumni yang akan dihasilkan ditakutkan tidak memiliki kelengkapan semua unsur ilmu-ilmu agama. Untuk itulah, prasarana utama dan model kurikulum yang dibakukan haruslah berupa terwakilinya semua unsur agama secara minimal di dalamnya.

Untuk itu ada beberapa ketentuan yang harus dipegangi dalam penyusunan model-model kurikulum yang dimaksud. *Pertama*, ketentuan untuk menghindari pengulangan (*'adamut-tikrar*), sepanjang tidak dimaksudkan untuk pendalaman (*ta'ammuq*) dan perjenjangan (*tadarruj*). Dengan demikian, dapat dihindarkan pemborosan waktu karena bagaimanapun tingkatan yang ingin

dicapai oleh model-model kurikulum itu adalah tingkatan minimal dalam pengetahuan agama. *Kedua*, pemberian tekanan pada latihan-latihan (*tamrinat*), karenanya buku yang dipaia diusahakan yang seringkas mungkin dalam ilmu-ilmu alat. *Ketiga*, tidak dapat dihindari adanya lompatan-lompatan yang tidak berurutan dalam penetapan buku-buku wajib (*kutub al-muqarranah*) selama masa pendidikan dari tahun ke tahun. *Keempat*, kurikulum tidak terlalu ditekankan pada buku-buku wajib tentang keutamaan akhlak (*fadha'il al-a'mal*), karena tujuan mencapai standart minimal tadi.¹⁸

Dengan demikian dapat di temukan rumusan kurikulum pesantren sebagai sebuah tawaran.

- a. Pemberian waktu terbanyak dilakukan pada unsur *nahwu-sharaf* dan *fiqh* karena kedua unsur ini masih memerlukan ulangan (*tikrar*), setidak-tidaknya untuk separo dari masa berlakunya kurikulum.
- b. Mata pelajaran lain hanya diberikan selama setahun tanpa diulang pada tahun-tahun berikutnya.
- c. Kalau diperlukan, pada tahun-tahun terakhir dapat diberikan buku-buku utama (*kutub al-muwathowwalah*) seperti *Shahih Bukhari* atau *Muslim* untuk hadits atau *ihya'* untuk tasawuf. Dengan demikian pelajaran setahun hanya dipusatkan pada penguasaan buku utama tersebut, yang diajarkan selama beberapa kali dalam sehari hingga selesai secara keseluruhan.

¹⁸ Wahid, *Menggerakkan . . .* hlm. 162-163.

Jelaslah bahwa dari kerangka komponen pendidikan agama yang sedemikian sederhana, dapat dikembangkan kurikulum yang lebih lengkap dan lebih bulat yang mampu menampung komponen pendidikan non-agama, tanpa adanya kekhawatiran penurunan tingkatan atau nilai pendidikan agama di pondok pesantren.

3. Kepemimpinan Pesantren

Pondok pesantren secara teknis merupakan tempat dimana santri tinggal.¹⁹ Sedangkan yang termasuk dalam warga pesantren adalah kiai (*ajengan, nun, atau bendara*) yang menjadi pengasuh, para guru (*ustadz*), dan para santri.²⁰ Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya menyebutkan, ada lima elemen yang menjadi dasar tradisi pesantren antara lain pondok (asrama), masjid, santri, pengajaran kitab Islam klasik (kitab kuning) dan kiai.²¹ Karakteristik yang membedakan lembaga pondok pesantren dengan lembaga lain diluar pondok pesantren. Dan juga sebagai ciri lingkungan pendidikan yang integral dan memiliki kultur yang unik. Karenanya, pesantren digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia.

Terdapat tiga elemen utama yang menjadikan pesantren sebagai sebuah subkultur; yaitu pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri, literature

¹⁹ *Ibid.* hlm 233.

²⁰ *Ibid.* hlm.16.

²¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm.79.

universalnya yang terus dipelihara selama berabad-abad, dan sistem nilai (*value system*) yang terpisah dari yang diikuti oleh masyarakat luas.²²

Unsur kiai merupakan elemen paling esensial dari suatu pesantren. Ia memiliki kedudukan ganda sebagai pengasuh dan sekaligus pemilik pesantren.²³ Kepemimpinan pesantren selama ini lazimnya bercorak alami. Pengembangan pesantren maupun proses pembinaan calon pemimpin yang akan menggantikan pimpinan yang ada belum memiliki bentuk yang teratur dan menetap.²⁴ Hal ini antara lain dikarenakan sistem menejerial yang diterapkan di pesantren bersifat serba tidak formal. Hanya saja ada kebiasaan bahwa kiai yang paling tua adalah pemegang otoritas penuh dalam kepemimpinan pesantren.²⁵ Tetapi banyak juga pengasuh yang sebenarnya tidak siap secara ilmu dan kepribadian tetap saja dipasang karena statusnya sebagai putra mahkota.

Akibatnya, sering kali terjadi penurunan kualitas kepemimpinan dengan berlangsungnya pergantian pemimpin dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga banyak dari kepemimpinan yang ada tidak mampu mengimbangi kemajuan dan perkembangan pesantren yang dikelolanya sehingga terjadi penyusutan kewibawaan kepemimpinan dalam satu masa ke masa yang lain.²⁶ Bahkan akibat terburuk dan sering terjadi, pesantren yang semula maju dan

²² Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan. Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2007) hlm.137.

²³ Wahid, *Menggerakkan Tradisi* . . . hlm. 17.

²⁴ *Ibid.* hlm.179.

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Pesantren Masa Depan* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999) hlm. 15.

²⁶ Wahid, op,cit.hlm.179.

tersohor, tiba-tiba kehilangan pamornya, malahan kadang mati, lantaran ditinggal kiainya. Sedangkan pengkaderannya kurang diperhitungkan.²⁷

Watak karismatik juga menjadi penyebab belum menetapnya pola kepemimpinan di pesantren. Dengan kata lain, kharisma adalah keunggulan kepribadian individu yang mengalahkan individu yang lain. Disamping itu, Gus Dur menegaskan, masih ada beberapa kurugian dari kepemimpinan karismatik ini, diantaranya: *pertama*, adalah munculnya ketidakpastian dalam perkembangan pesantren yang bersangkutan dikarenakan semua hal tergantung pada keputusan pribadi sang kiai; *kedua*, sulitnya keadaan bagi tenaga-tenaga pembantu (termasuk calon pengganti yang kreatif) untuk mencoba pola-pola pengembangan yang belum diterima oleh kepemimpinan yang ada; *ketiga*, pola pergantian pimpinan yang berlangsung tiba-tiba dan tidak direncanakan sehingga lebih banyak ditandai sebab-sebab alami, seperti meninggalnya sang pemimpin secara mendadak, 4) terjadinya pembaruan dalam tingkat-tingkat kepemimpinan pesantren, antara tingkat lokal, regional maupun nasional.²⁸

Namun demikian Gus Dur menambahkan, tidak berarti harus dihilangkan kepemimpinan karismatis yang sudah berabad-abad berjalan dipesantren itu, tetapi menuntut pola kepemimpinan yang lebih direncanakan dan dipersiapkan

²⁷ *Ibid.* hlm.16.

²⁸ *Ibid.*, hlm.180-182.

sebelumnya. Karisma yang ada, dengan demikian akan diperkuat dengan beberapa sifat baru yang akan mampu menghilangkan kerugian diatas.²⁹

Selanjutnya dalam merespon perkembangan dunia pendidikan yang semakin terus berkembang, maka menuntut adanya pemimpin pesantren yang memiliki kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan sekarang dan masa depan serta harus mampu pula memahami kebutuhan akan integrasi pesantren ke dalam pendidikan nasional. Kepemimpinan yang dinamis di pesantren haruslah mampu mengadakan gebrakan dalam dunia pendidikan baik dalam tingkatan lokal, regional, dan nasional.

Dalam taraf lokal, Gus Dur menginginkan kepemimpinan pesantren harus mampu mengadakan proyek-proyek rintisan yang menonjolkan pada sumbangan-sumbangan positif pesantren bagi pendidikan nasional. Pada taraf regional, harus mampu menciptakan dukungan dan topangan bagi proyek rintisan, lebih-lebih pengayoman kepada semua pihak yang terkait dalam pengembangan pendidikan. Sedangkan dalam taraf nasional, kepemimpinan dalam pesantren harus mampu menyuguhkan kerangka teoritis dan filosofis bagi pembentukan pendidikan nasional yang relevan dengan kebutuhan dan Negara masa depan.³⁰

Oleh karenanya, pemimpin pesantren dalam kepemimpinan harus memiliki pandangan jauh ke depan, tidak hanya sibuk dengan fungsi kemasyarakatan yang sempit belaka, serta jangan juga hanya disempitkan oleh

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm.193.

pelayanan teknis pada pesantrennya sendiri saja. Yang diperlukan adalah pendayagunaan kepemimpinan yang sudah memiliki ketrampilan praktis yang sempit di bidang pengawasan, administrasi dan perencanaan itu guna tujuan yang lebih besar: yaitu bagaimana mengintegrasikan pesantren ke dalam pendidikan nasional.³¹

Dengan cara seperti ini kepemimpinan dinamis dipesantren dapat mencegah semakin berlarut-lartunya kemelut di pesantren, dan mengembangkan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan kemasyarakatan yang benar-benar mampu menghadapi tantangan zaman.

B. Konstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Modernisasi Pesantren

Pesantren atau pondok adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Sebab pesantren juga terlahir dari kondisi kultural masyarakat sekitar. Faktor inilah yang menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia (*indigenous*).³²

Ironisnya lembaga yang dianggap merakyat ini ternyata masih diragukan kemampuannya dalam menjawab tantangan zaman, utamanya ketika dihadapkan pada arus modernisasi. Tapi seiring lahirnya tantangan bagi penyelenggara pendidikan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki komposisi

³¹ *Ibid.*, hlm.194.

³² Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Dian Rakyat, tt.) hlm.3.

intelektual dan spiritual yang seimbang, lembaga ini jugalah yang digadagadag bakal mampu menjawab tantangan tersebut.

Sebab di samping lembaga ini menyimpan khazanah Islam klasik, pesantren adalah sistem pendidikan yang bersifat *indigenous* Indonesia. Permasalahannya kembali kepada respon pesantren itu sendiri, sebab untuk membentuk manusia yang seimbang secara intelektual dan spiritual, pesantren diharapkan untuk mau membuka diri dengan dunia luar (modern). Dengan tidak meninggalkan jiwa kepesantrenannya agar fungsinya sebagai benteng moral bangsa tidak memudar.

Menurut Nurcholish Madjid selama ini lembaga pendidikan Islam tradisional cenderung menolak modernisasi dikarenakan adanya anggapan bahwa perkataan “modern” itu mempunyai konotasi “Barat”. Hal ini tidak benar menurut Nurcholish Madjid. Menurutnya, anggapan ini lahir karena nilai-nilai yang dianggap modern itu memang didominasi nilai-nilai dari Barat. Berpijak pada anggapan tersebut kita digiring untuk mengakui bahwa peradaban modern yang melanda dunia, termasuk Indonesia, adalah hasil invasi peradaban Barat. Karena itu ada orang yang mengatakan bahwa modernisasi sesungguhnya penghalusan dari pengertian westernisasi.³³

³³ *Ibid.* hlm.95.

Modernisasi menurut Nurcholish Madjid adalah rasionalisasi bukan westernisasi.³⁴ Umat Islam jika ingin maju harus melakukan modernisasi, dalam artian rasionalisasi, yakni proses pemberontakan pola pikir dan kata kerja lama yang tidak akliah (irasional). Menggantinya dengan pola pikir dan kata kerja baru yang akliah (rasional).³⁵ Fungsi cara berfikir dengan pola itu adalah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal, demi memperoleh ilmu pengetahuan.

Tentang anggapan bahwa modernisasi identik dengan westernisasi Nurcholish Madjid menyanggahnya panjang lebar. Menurutnya nilai-nilai modern itu sifatnya adalah universal, berbeda dengan nilai-nilai Barat yang lokal atau regional saja. Maka dari itu, yang menjadi arus bawah dari peradaban modern adalah sesuatu yang bersifat universal, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tantangan zaman modern pada hakikatnya adalah tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan tantangan yang bersifat khusus Barat adalah akibat sampungan saja, dan tentunya tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa sekarang ini orang-orang Barat masih memegang dominasi kepemimpinan dunia.³⁶

³⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran-Pikiran Nurcholish Madjid Muda* (Bandung: Mizan, 1992), hlm.171.

³⁵ *Ibid*, hlm 172.

³⁶ Semula implikasi dari kemodernan bersifat positif, yaitu kemajuan-kemajuan yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi, setelah melihat dampak yang dibawa oleh kemajuan-kemajuan tersebut makin banyak orang yang bersikap kritis dengan mengemukakan implikasi negatifnya. Bentuk implikasi negative yang sering dilontarkan adalah merosotnya nilai-nilai kehidupan rohani, tercerabutnya budaya-budaya lokal, dan degradasi moral (terutama) yang melanda generasi muda kita. Madjid. *Bilik* . . . hlm.95.

Nurcholish Madjid mengklasifikasikan dua persoalan yang menjadi tantangan pondok pesantren saat ini, yaitu: *pertama*, kelompok persoalan primer, yakni bagaimana menyuguhkan kembali isi pesan moral yang diembannya itu kepada masyarakat abad ini begitu rupa sehingga tetap relevan dan memiliki daya tarik. Tanpa relevansi dan daya tarik itu, kemampuan atau efektifitasnya tidak dapat diharapkan.

Nurcholish Madjid juga memberikan sebuah pemisalan, yaitu ibarat rokok isinya boleh dan mungkin harus tetap ktretek, sebab ternyata lebih sehat dari jenis “cigarette” dan mampu mengisi selera dunia. Tetapi juga saat signifikan untuk dipikirkan bagaimana membungkus dan menanganinya lebih baik dan lebih higienis, sehingga akan memiliki hak hidup pada zaman sekarang karena memenuhi standar yang ditetapkan.³⁷

Begitu juga pesantren dalam mengemban tugas moralnya, bahwa sistem tradisional yang ada saat ini boleh saja harus tetap dipertahankan, namun metode-metode dalam proses pendidikan yang diterapkan harus dikemas secara menarik dan rasional, sehingga lebih efektif dalam membentuk pikiran liberal (manusia merdeka), yang terbebas dari kungkungan ideologi yang menindas, konservatif dan cenderung mempertahankan *status quo*. Sebab apabila sistem atau metode pendidikan tidak diperbaharui ke arah yang rasional, pesantren sebagai sumber nilai dan ajaran agama yang ditekuni pesantren adalah

³⁷ *Ibid*, hlm.115.

merupakan pengembangan tugas moral akan semakin tidak menarik dan akan kehilangan daya adaptabilitasnya dengan realitas sosial.³⁸

Kedua, kelompok persoalan sekunder, yaitu persoalan bagaimana pesantren dapat menguasai dan mengembagkan dalam pelbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang fungsional, yang saat ini sedang dikuasai oleh Barat.³⁹ Atau dengan kata lain, bagaimana umat islam , khususnya pesantren, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki spiritualitas, sehingga ia menjadi *rahmat* dan kondusif. Jika pesantren, dan umat Islam pada umumnya, gagal dalam menjawab tantangan ini berarti membiarkan dunia dan manusia secara perlahan-lahan atau cepat meluncur ke dalam jurang kehancuran.

Nurcholish Madjid panjang lebar menjelaskan, akan lebih buruk lagi efeknya apabila pesantren hanya memilih peran moral saja, dengan tidak disertai usaha meningkatkan mutu penyuguhan metode pendidikan. maka yang akan terjadi adalah semakin lemahnya hak hidup pesantren di tengah kehidupan abad ini, untuk kemudian tidak diakui sama sekali dan lenyap. Tidak mudah mengatakan apakah hal itu akan menguntungkan atau merugikan, atau menunjuk siapa yang untung dan yang rugi, apabila dipermisalkan dengan kasus lenyapnya kesultanan-kesultanan di Indonesia sekarang ini. Namun yang jelas, pesantren

³⁸ Abudin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005),hlm.292.

³⁹ Madjid, Op.cit, hlm.115.

sebagai sistem pendidikan Islam tradisional dengan segala aspeknya akan menjadi dan tinggal kenangan semata.⁴⁰

Maka dari itu menurut Nurcholish Madjid, kemungkinan ideal yang dilakukan pesantren adalah dengan mengambil posisi sebagai pengembang amanat ganda (*duo mission*), yaitu amanat keagamaan atau moral dan amanat ilmu pengetahuan. Dua amanat ini dilakukan serentak dan proporsional sehingga tercapai keseimbangan yang diharapkan.⁴¹

Hal itu tidak mudah, mengingat ditinjau dari awal berdirinya pesantren memang ditujukan sebagai lembaga yang hanya mendalami ilmu agama (*tafaqquh fi dien*). Selain itu ada dua kondisi sebagai penyebabnya, *pertama*, masih adanya ambivalensi orientasi pendidikan. Akibatnya, sampai saat ini masih terdapat kekurangan dalam sistem pendidikan yang diterapkan. Hal ini disebabkan masih terdapatnya anggapan bahwa hal-hal yang terkait kamasyarakatan atau keduniawian (*muamalah*), seperti penguasaan berbagai disiplin ilmu umum (sains), keterampilan dan profesi sekolah semata-mata merupakan garapan khusus sistem pendidikan sekuler. *Kedua*, adanya pemahaman atau dikotomis yang memisahkan antara ilmu agama dan sains.⁴²

Kedua permasalahan ini memang sangat klasik dan terkesan usang. Tetapi, diakui ataupun tidak, realitas ini sangat mengganggu keberlangsungan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 116.

⁴¹ *Ibid*,

⁴² Amin Haedari, dkk, *Pesantren Masa Depan; Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global* (Jakarta: IRD PRESS, 2004), hlm.84.

perjalanan pesantren ke depan. Nurcholish Madjid menambahkan, saat ini ada berbagai paradigma di kalangan pesantren dalam mengapresiasi diri mereka sendiri. Sebagai respon terhadap tantangan dan arus zaman, apresiasi ini setidaknya ada empat macam, yaitu;⁴³ *pertama*, yang merupakan bagian terbesar yaitu kelompok pesantren yang tidak menyadari dirinya, apakah bernilai baik atautkah bernilai kurang baik. Pandangan ini menganggap bahwa apa yang terjadi adalah terjadi begitu saja, tanpa ada persoalan serius yang perlu dipikirkan.

Kedua, adalah kelompok yang berpandangan seperti seorang *zealot* atau fanatikus, karena kefanatikannya membuat penilaiannya kurang obyektif. Kelompok ini menilai bahwa semua pesantren dengan segala aspeknya pasti positif dan mutlak harus dipertahankan.

Ketiga, adalah kelompok yang terhinggapi perasaan rendah diri. Perasaan ini seringkali menumbuhkan sikap pesimis dan kurang percaya diri dalam mengejar ketertinggalannya, sehingga mereka menganggap identitas pesantrennya tidak perlu dipertahankan. Hal ini berakibat pada rusaknya identitas pesantren secara keseluruhan.

Keempat, yaitu pandangan yang menyadari bahwa pesantren memiliki segi-segi positif maupun negatifnya sehingga dapat melihat mana yang harus diteruskan dan mana yang harus ditinggalkan. Kelebihan pandangan ini adalah dalam melakukan introspeksi secara obyektif sehingga pesantren yang

⁴³ Madjid, *Bilik*. . . hlm.112.

dimilikinya menjadi mampu beradaptasi secara positif dengan dinamika zaman dan perkembangan masyarakat.

Secara historis, keberadaan pesantren-pesantren lahir pada zamannya yang tepat, karena pada saat itu pesantren sangat fungsional dan mampu memberi jawaban terhadap tantangan zaman. Hal ini dapat dilihat dari peran pesantren dalam menghadapi penetrasi kolonialisme asing baik dalam bidang politik maupun bidang sosial budaya sampai peranannya dalam mencapai kemerdekaan.⁴⁴ Dalam masa ini pesantren terbukti telah memainkan peran cukup penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Tetapi peranan pesantren masa kini dan lebih-lebih untuk masa mendatang, dalam perspektifnya, telah membuat dirinya berada di persimpangan jalan, yaitu persimpangan antara meneruskan peranan yang telah dikembangkan selama ini atau menempuh jalan menyesuaikan diri samasekali dengan keadaan. Yang dimaksud dengan harus menyesuaikan diri dengan keadaan itu adalah keikutsertaan sepenuhnya dalam arus pengembangan ilmu-pengetahuan (modern), termasuk di dalamnya bagian yang merupakan ciri utama kehidupan abad ini, yaitu teknologi⁴⁵. Hal ini merupakan problem umum dunia pendidikan Islam yang menurut M. Irsan Kaelani terpolarisasi arahnya antara masa lalu sentris ataukah barat sentris.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.* hlm.113.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: LKiS, 2008).hlm.5.

Ada beberapa hal yang disorot oleh Nurcholish Madjid terkait dengan lembaga pesantren sebagai faktor penyebab kurang mampunya lembaga tersebut mengikuti perkembangan zaman, *pertama* lemahnya visi dan tujuan yang dibawa pesantren.⁴⁷ Agaknya tidak banyak pesantren yang mampu secara sadar merumuskan tujuan pendidikannya dan menuangkannya dalam tahapan-tahapan rencana kerja atau program. Kondisi ini lebih disebabkan oleh adanya kecenderungan visi dan tujuan pesantren diserahkan pada improvisasi yang dipilih sendiri oleh kiai atau bersama-sama para pembantunya.

Kedua, adanya pengaruh semangat pribadi para pendirinya terhadap pesantren, hal ini memang sulit dihindari dan juga bukan kesalahan mereka. Para pendiri itu tidak an sich salah, kalau saja hambatan bagi perkembangan pesantren tidak timbul dari dominasi pengaruh ini. Sebab, seorang pribadi tentulah tidak lebih daripada kapasitas-kapasitas fisik maupun mentalnya. Ia memiliki kemampuan-kemampuan yang terbatas, terlebih terhadap sesuatu yang belum diketahuinya. Keterbatasan akan pengetahuan tersebut tentu akan tercermin pula dalam keterbatasan kemampuan mengadakan respon terhadap perkembangan masyarakat.⁴⁸

Meski demikian di sisi lain Nurcholish Madjid juga melihat adanya potensi dari pesantren untuk menjadi lembaga pendidikan alternatif untuk

⁴⁷ Madjid, *Bilik . . .* hlm.6.

⁴⁸ *Ibid.* hlm.7.

mencipta manusia yang seimbang secara spiritual dan intelektual. Tentunya harus ada sisi perbaikan agar tujuan tersebut tercapai, diantaranya:

1. Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren

Tujuan pendidikan merupakan bagian terpadu dari faktor-faktor pendidikan. Tujuan termasuk kunci keberhasilan pendidikan, di samping faktor-faktor lainnya yang terkait: pendidik, peserta didik, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Keberadaan empat faktor ini tidak ada artinya bila tidak diarahkan oleh suatu tujuan. Sebab tujuan berfungsi sebagai;⁴⁹ [a] mengakhiri usaha [b] mengarahkan usaha [c] titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik tujuan-tujuan baru maupun tujuan-tujuan lanjutan dari tujuan utama [d] memberikan nilai (sifat) pada usaha-usaha itu. Tak ayal lagi bahwa tujuan menempati posisi yang amat penting dalam proses pendidikan sehingga materi, metode, dan alat pengajaran selalu disesuaikan dengan tujuan. Tujuan yang tidak jelas akan mengaburkan seluruh aspek tersebut.

Tujuan pendidikan pesantren adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat berkhidmat kepada masyarakat dan kiai dengan jalan menjadi kawla (mengikuti

⁴⁹ Djamaluddin, *Kapita Selekta Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.14.

sunah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kejayaan Islam di tengah masyarakat, mencintai dan mengembangkan kepribadian Indonesia.⁵⁰

Ironisnya, dalam merumuskan tujuan pendidikan pesantren, agaknya tidak banyak pesantren yang mampu secara sadar merumuskan tujuan pendidikannya dan menuangkannya dalam rencana kerja atau program.⁵¹ Tujuan yang dimilikinya hanya ada dalam angan-angan. Mastuhu melaporkan bahwa tidak pernah dijumpai perumusan tujuan pendidikan pesantren yang jelas dan standar yang berlaku umum bagi semua pesantren.⁵² Tidak adanya perumusan tujuan itu menurut Nurcholish Madjid, disebabkan adanya kecenderungan visi dan tujuan pesantren sepenuhnya berada ditangan kiai yang bersangkutan atau bersama-sama dengan para pembantunya secara intuitif disesuaikan dengan suasana pesantrennya.⁵³ Hal ini tidak bisa dielakkan, karena kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Maka sudah sewajarnya anggapan bahwa pertumbuhan pesantren semata-mata bergantung pada hasil usaha pribadi kiainya.

Dalam pesantren kiai adalah pemimpin tunggal yang memegang kewenangan hampir mutlak. Ia ibarat raja, segala titahnya menjadi konstitusi—baik tertulis maupun konvensi—yang berlaku bagi kehidupan pesantren. Ia memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman terhadap santri-santri yang melanggar

⁵⁰ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994) hlm. 53.

⁵¹ Madjid, *Bilik . . .* hlm.6.

⁵² Mastuhu, *Dinamika . . .* hlm.54.

⁵³ Madjid, *op.cit.*

ketentuan-ketentuan titahnya menurut kaidah-kaidah normatif yang mentradisi di kalangan pesantren. Dari sinilah kemudian muncul anggapan pesantren diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil dengan kiai sebagai sumber kekuasaan dan kewenangan dalam kerajaan tersebut. Oleh karenanya cukup logis memang bila dikatakan bahwa kebijakan tujuan pesantren berada pada kebijakan kekuasaan otoritas kyai. Sehingga hampir tidak ada rumusan tertulis tentang arah, sasaran pendidikan pesantren kecuali pada otoritas kyai.

Menurut Nurcholish Madjid, keberlangsungan sebuah pesantren yang semata-mata karena otoritas kyai seperti gambaran diatas, punya dampak negatif bagi pesantren dalam perkembangannya. Hal ini berdasarkan atas profil kyai sebagai pribadi yang punya keterbatasan dan kekurangan. Umpamanya saja, dari segi non-fisik, pribadi tersebut mengetahui beberapa hal, tetapi bisa dipastikan lebih banyak lagi hal yang belum diketahuinya. Maka keterbatasannya akan pengetahuan tersebut akan tercermin pula dalam kemampuan mengadakan responsi pada perkembangan- perkembangan masyarakat.⁵⁴ Lebih jauh Nurcholish Madjid mencontohkan seorang kyai yang kebetulan tidak dapat membaca-menulis huruf latin mempunyai kecenderungan lebih besar untuk menolak dan menghambat dimasukkannya pengetahuan baca-tulis kedalam kurikulum pesantren. Atau seorang tokoh pesantren yang tidak mampu lagi mengikuti dan menguasai perkembangan

⁵⁴ *Ibid.* hlm.7.

zaman mutakhir tentu cenderung untuk menolak mengubah pesantrennya mengikuti zaman tersebut.⁵⁵

Kurangnya kemampuan pesantren dalam merespon dan mengimbangi perkembangan zaman tersebut, ditambah faktor lain yang beragam membuat produk-produk pesantren dianggap kurang siap untuk “lebur” dan mewarnai kehidupan modern.⁵⁶ Dengan kata lain pesantren hanya mampu memunculkan santri-santri dengan kemampuan yang terbatas. Tentunya kita tidak ingin hal tersebut terjadi pada santri dan lulusan pesantren.

Untuk itulah, seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, pesantren dituntut memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk dijadikan acuan dan target yang akan dicapai. Disamping itu para pengelola pesantren yaitu kiai dituntut untuk bekerja keras dan berupaya mewujudkan tujuan tersebut.

Dalam hal ini Nurcholish Madjid memberikan poin penting yang harus dijadikan acuan pesantren dalam merumuskan tujuan pendidikannya, *Pertama* pesantren berhak, malah lebih baik dan berguna mempertahankan fungsi pokoknya semula, yaitu sebagai tempat menyelenggarakan pendidikan agama. Tetapi diperlukan suatu tinjauan sedemikian rupa sehingga ajaran-ajaran agama yang diberikan kepada setiap pribadi merupakan jawaban yang komprehensif atas persoalan makna hidup dan weltanschauung Islam, selain tentu saja disertai dengan pengetahuan yang secukupnya tentang kewajiban-

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

kewajiban praktis seorang Muslim sehari-hari. *Kedua*, pesantren harus tanggap dengan tuntutan-tuntutan hidup anak didiknya kelak dalam kaitannya dengan perkembangan zaman. Di sini pesantren dituntut dapat membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan nyata yang dapat membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan nyata yang dapat melalui pendidikan atau pengajaran umum secara memadai. Di bagian ini pun, sebagaimana layaknya yang terjadi sekarang, harus tersedia jurusan-jurusan alternative bagi anak didik sesuai dengan potensi dan bakat mereka.⁵⁷

Demikianlah, lembaga pendidikan Islam harus memiliki orientasi yang jelas, orientasi yang dapat membuat gerak pendidikan lebih terarah, teratur, dan terencana. Orientasi yang didasarkan pada pengadaan berbagai kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidikan Islam sebagai jawaban terhadap pelbagai tuntutan dan tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi ini, era yang penuh dengan persaingan, baik antar daerah, lembaga pendidikan, kebijakan, sistem pendidikan, dan juga persaingan antarlulusan lembaga pendidikan.

2. Penyempitan Orientasi Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu instrumen dari suatu lembaga pendidikan, termasuk pendidikan pesantren. Namun pembahasan mengenai kurikulum sebenarnya belum banyak dikenal pesantren. Bahkan di Indonesia terma kurikulum belum pernah populer pada saat proklamasi kemerdekaan,

⁵⁷ *Ibid.* hlm.18.

apalagi sebelumnya.⁵⁸ Berbeda dengan kurikulum Istilah materi pelajaran justru mudah dikenal dan mudah dipahami di kalangan pesantren. Meskipun demikian untuk pemaparan berbagai kegiatan baik yang berorientasi pada pengembangan intelektual ketrampilan, pengabdian maupun secara umum kepribadian agaknya lebih tepat digunakan istilah kurikulum. Jadi kurikulum dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu.⁵⁹

Menurut Nurcholish Madjid, kurikulum yang berlaku di lingkungan pesantren masih di dominasi pelajaran agama, yang bahkan materinya khusus disajikan dalam berbahasa Arab. Sedangkan materi keagamaan tidak digarap secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini Nurcholish Madjid membedakan antara istilah materi pelajaran agama dan keagamaan. Dimana perkataan agama lebih tertuju pada segi formil dan ilmunya saja. Sedangkan keagamaan lebih mengenai semangat dan rasa agama (*religiusitas*).⁶⁰ Namun justru semangat dan rasa keberagaman inilah yang dipelajari sambil lalu, tidak secara sungguh-sungguh. Padahal, Nurcholish Madjid menambahkan, justru segi inilah yang akan lebih berfungsi dalam masyarakat zaman modern, bukan fiqh atau ilmu kalamnya, apalagi nahwu-sharaf serta bahasa Arabnya.⁶¹

⁵⁸ Mujamil Qomar, *Pesantren* . . . hlm.108.

⁵⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). Hlm.122.

⁶⁰ Madjid, *Bilik* . . . hlm.100.

⁶¹ *Ibid.* hlm.101.

Lebih jauh Nurcholish Madjid menginginkan penerapan kurikulum di pesantren dengan tidak meniadakan *ceck and balance*. Yaitu perimbangan antara materi khazanah Islam klasik dan perimbangan antara pengetahuan keislaman dan pengetahuan umum. Dengan begitu lulusan pesantren akan menjadi individu yang ideal, tidak pincang serta menjadi individu yang siap lebur dan mewarnai kehidupan masyarakat modern.

Berbeda dengan Nurcholish Madjid, menurut Abdul Munir Mulkan, usaha integrasi kedua sistem ilmu (ilmu agama dan ilmu umum) hanya akan menambah persoalan makin ruwet. Ini disebabkan belum tersusunnya konsep ilmu integral yang ilmiah yang mampu mengatasi dikotomi ilmu umum dan agama itu sendiri. Integrasi kurikulum pesantren tidak lebih sebagai penggabungan dua sistem ilmu tanpa konsep. Akibatnya, tujuan praktis untuk meningkatkan daya saing lulusan dengan sekolah umum, menjadi sulit dipenuhi.⁶²

Azyumardi Azra menambahkan “Pemasukan ilmu umum dalam pelajaran atau kurikulum pesantren banyak permasalahannya. Muncul persoalan tentang bagaimana secara epistemologis untuk menjelaskan ilmu-ilmu empiris atau ilmu-ilmu alam dari kerangka epistemologi Islam tersebut.”⁶³ Hal ini memang menimbulkan persoalan tersendiri dalam tubuh

⁶²Abdul Munir Mulkhan, *Dilema Madrasah di Antara Dua Dunia* [http://www.iias/Dilema madrasah/annex5 hatml](http://www.iias/Dilema%20madrasah/annex5%20hatml) (diakses pada tgl 15 Maret 2010)

⁶³ Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999). hlm. 95.

pesantren yang mengalami modernisasi. Kebanyakan ilmu alam yang mereka (pesantren) masukkan dalam kurikulum tidak mempunyai hubungan dengan Islam. Sebagai contoh Pondok Modern Gontor salah satunya yang memasukkan kurikulum pelajaran umum, bahasa Inggris. Jelas sekali pelajaran bahasa Inggris tidak ada hubungannya dengan tradisi keilmuan dalam Islam. Hal ini beda dengan bahasa Arab yang digunakan untuk mempelajari kitab kuning dalam pesantren tradisional.

Meskipun demikian hal tersebut seharusnya bukan malah menjadi penghambat pesantren melakukan perubahan, namun justru menjadi tugas pesantren mencari solusi dari problem yang dihadapinya. Nurcholish Madjid menambahkan, pesantren dan sistem-sistemnya memang dihadapkan pada tantangan zaman yang cukup berat. Jika tidak mampu memberi respon yang tepat maka pesantren akan kehilangan relevansinya dan akar-akarnya dalam masyarakat akan tercerabut dengan sendirinya.⁶⁴ Senada dengan hal tersebut, A. Malik Fadjar juga menegaskan bahwa kurang tertariknya masyarakat untuk memilih lembaga-lembaga pendidikan Islam sebenarnya bukan karena terjadi pergeseran nilai-nilai ikatan keagamaan yang mulai memudar, melainkan karena sebagian besar lembaga pendidikan Islam kurang menjanjikan dan kurang responsif terhadap tuntutan dan permintaan

⁶⁴ Madjid, *Bilik . . .* hlm. 108.

saat ini maupun mendatang.⁶⁵ Untuk itulah, tidak salah anggapan Nurcholish Madjid, bahwa pesantren yang memenuhi selera masyarakat dalam memasuki era modern saat ini adalah yang dalam penerapan kurikulum pembelajarannya memadukan antara materi khazanah Islam klasik dan pengetahuan keagamaan serta pengetahuan umum.

3. Pemimpin Yang Legitimate dalam Proses Perubahan.

Pola pergantian kepemimpinan di pesantren selama ini bercorak alami, oleh karena di pesantren belum ada pola tertentu yang diikuti dalam proses suksesi ini. Begitu pula dalam proses pembinaan dan pengkaderan kepemimpinan pesantren belum ada bentuk yang menetap dan mapan. Kendatipun demikian, ada corak tersendiri dari kepemimpinan pesantren yaitu sebuah kepemimpinan karismatis.⁶⁶

Gaya kepemimpinan yang karismatik ini memang dalam kepentingan tertentu masih sangat dibutuhkan karena masih membawa manfaat. Menurut Muslimin Nasution, sebagaimana dikutip Mujamil Qomar, kepemimpinan kiai yang karismatik akan menjadi panutan para santri yang peduli terhadap kehidupan masyarakat. Dengan potensi kiai dan santri sebagai panutan masyarakat, pesantren sebagai lembaga strategis penggerak pembangunan pedesaan. Pesantren juga berperan strategis sebagai pembentuk kader

⁶⁵ A. Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia [LP3NI], 1998), hlm. 104.

⁶⁶ Kepemimpinan yang tidak bersandar pada skill atau keahlian namun bersandar pada kepercayaan atau pandangan santri dan masyarakat tradisional sebagai jamaah bahwa sang kiai mempunyai kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Lihat Amin Haedari, dkk., *Masa Depan Pesantren . . .* hlm.60.

pembangunan yang memiliki imtaq dan iptek yang tinggi.⁶⁷ Selain itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, sangat ditentukan oleh figur kiaiinya. Semakin karismatik kiaiinya, semakin besar kecenderungan orang mempersepsikan kebesaran pesantren itu. Kelangsungan pesantren sangat ditentukan oleh keberadaan kiai tersebut. Pesantren tetap memerlukan figur kiai dengan tingkatan karisma tradisional atau karisma yang diperoleh dari keturunan yang memiliki karisma sebelumnya. Melalui gaya karismatik pula instruksi dari kiai dapat begitu lancar dijalankan oleh para ustadz atau santrinya tanpa hambatan psikologis seperti tindakan indisipliner. Akan tetapi pada bagian lain gaya kepemimpinan karismatik itu justru menimbulkan kerugian yang oleh Nurcholish Madjid dipaparkan sebagai berikut.

1. Pola kepemimpinan kharismatik jauh dari unsur demokratis, sebab tidak rasional. Lebih-lebih jika disertai dengan tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyuburkan kharisma seperti adanya gap (jaga jarak) dan ketinggian dari para santri.
2. Personal. Karena kepemimpinan kiai adalah pola kepemimpinan kharismatik, maka dengan sendirinya juga bersifat pribadi atau personal. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa seorang kiai tidak mungkin digantikan orang lain serta sulit ditundukkan dibawah *rule of the game*-nya administrasi dan manajemen modern.

⁶⁷ Qomar, *Pesantren* . . . hlm.38.

3. Religio-feodalisme. Seorang kiai selain menjadi pemimpin agama sekaligus menjadi *traditional mobility* dalam masyarakat feodal
4. Kecakapan teknis. Karena dasar kepemimpinan dalam pesantren seperti itu maka faktor teknis menjadi tidak begitu penting. Dan kekurangan tersebut menjadi salah satu sebab pokok tertinggalnya pesantren dari perkembangan zaman.⁶⁸

Kerugian lain yang ditimbulkan dari pola kepemimpinan semacam ini adalah ketidakpastian dalam perkembangan pesantren yang bersangkutan, karena semua hal bergantung pada keputusan pribadi sang pemimpin. Hal ini tidak lepas dari peran kiai sebagai figur sentral, otoritatif dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan.⁶⁹ Sering kali proses pengembangan yang telah direncanakan secara matang harus terhenti hanya karena menunggu restu dari sang kiai, sehingga kemudian akan menghilangkan gairah untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti bagi pesantren. Kondisi semacam ini juga menimbulkan keengganan bagi generasi muda untuk melakukan inovasi-inovasi baru demi pengembangan pesantren lantaran khawatir dianggap melangkahi kebijakan tertinggi di pesantren tersebut.⁷⁰

Untuk itulah harus ada perubahan pola-pola kepemimpinan kiai di pesantren dari karismatik menuju rasionalistik, dari otoriter-paternalistik

⁶⁸ Madjid, *Bilik* . . . op.cit, hlm 102-103.

⁶⁹ M. Sulton Masyhud dan Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), hlm.115.

⁷⁰ Amie Haedari, dkk, *Masa Depan Pesantren* (Jakarta:IRD PRESS, 2004) hlm. 216.

menuju diplomatik-partisipatif, atau dari *laissez faire* menuju demokratik.⁷¹ Gaya-gaya kepemimpinan yang diharapkan terwujud tersebut mengarah pada tipe kepemimpinan yang professional. Nurcholish Madjid menyebutnya sebagai kepemimpinan yang *legitimate*, sah menurut ukuran-ukuran pesantren untuk memimpin proses perubahan pada pesantren.⁷² Meskipun demikian Nurcholish Madjid menggaris bawahi agar tetap bersikap penuh kehati-hatian. Perubahan yang dilakukan tidak mungkin “radikal revolusioner”, tetapi diusahakan seperti kata pepatah “Bagaimana benang tak putus tepung tak terserak”.⁷³

Selain itu Nurcholish Madjid juga menambahkan *skill* atau keahlian sebagai pra-syarat bagi seorang pemimpin pesantren.⁷⁴ Hal ini penting sebab berhubungan dengan kemampuan si pemimpin untuk bisa memanage seluruh persoalan sehingga dapat dibuat skala prioritas pemecahannya, kemudian dapat dituangkan dalam rencana kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian pesantren memiliki pemimpin yang visioner dalam menatap masa depan sehingga orientasinya tidak melulu pada kecakapan ibadah, tetapi juga kecakapan fungsional dalam menghadapi tantangan-tantangan baru.

⁷¹ Masyhud dan Khusnuridlo, *Manajemen . . .* hlm.15.

⁷² Madjid, *Bilik . . .* hlm.109.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

C. Analisis Perbandingan

Modernisasi berasal dari kata modern yang berarti terbaru, mutakhir, atau sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya modernisasi diartikan sebagai proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.

Tatanan masyarakat yang maju dipengaruhi adanya modernisasi, sementara modernisasi itu sendiri sangat bergantung pada keberhasilan modernisasi lembaga pendidikan, bahkan Josep S. Szliowies dengan tegas mengatakan bahwa lembaga pendidikan itu sebenarnya merupakan kunci keberhasilan modernisasi.⁷⁵

Dalam memahami gejala modernitas yang kian dinamis, pesantren memiliki dua tanggung jawab secara bersamaan, yaitu sebagai lembaga pendidikan agama Islam dan sebagai bagian integral masyarakat yang bertanggung jawab terhadap perubahan dan rekayasa sosial. Kini pesantren menghadapi tantangan baru, berupa tantangan pembangunan, kemajuan, pembaharuan, serta tantangan keterbukaan dan globalisasi. Untuk itulah pesantren diharapkan dapat berperan menciptakan dukungan sosial bagi pembangunan yang sedang berjalan. Sebuah dukungan yang dinamis, spontan, dan langgeng.

⁷⁵ Josep S. Szliowies, dalam Ahmad Djainuri (ed), *pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam* (Surabaya: Al-Iklash, 2001) hlm.3.

Hal inilah yang nampaknya disadari betul oleh Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid tentang gagasannya untuk memodernisasi pendidikan Islam tradisional (pesantren). Sebagai orang yang lahir dan di besarkan dilingkungan pesantren, kedua tokoh sadar akan tantangan-tantangan yang dihadapi pesantren serta kemampuan lembaga tersebut untuk menjawab tantangan yang ada. Berangkat dari persamaan latar belakang inilah kedua tokoh me-landing-kan gagasannya tentang modernisasi pesantren.

Modernisasi pesantren menurut Gus Dur merupakan proses perubahan pesantren kearah penyempurnaan keadaan. Kata modernisasi sebenarnya masuk dalam kandungan kata dinamisasi. Yang mana dinamisasi pada dasarnya mencakup dua buah proses, yaitu penggalan kembali nilai-nilai hidup positif yang telah ada, selain mencakup pula pergantian nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru yang dianggap lebih sempurna. Proses pergantian nilai itulah yang disebut Modernisasi.⁷⁶

Sedangkan modernisasi dalam pandangan Nurcholish Madjid adalah rasionalisasi, yakni proses pemberontakan pola pikir dan tata kerja lama yang tidak akliah (irasional), menggantinya dengan pola pikir dan tata kerja baru yang akliah (rasional).⁷⁷ Dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan Islam keduanya menghendaki agar selalu melakukan upaya rekonstruksi pemahaman terhadap ajaran-ajarannya agar tetap relevan dan survive. Pesantren harus mampu

⁷⁶ Wahid, *Menggerakkan . . .* hlm.53.

⁷⁷ Madjid, *Islam Kerakyatan . . .* hlm.172.

mewujudkan sistem pendidikan yang sinergik. Yakni sistem yang memadukan akar tradisi dan modernitas.

Pemaduan antara akar tradisi dan modernitas dalam wacana pemikiran Islam disebut dengan neomodernis. Selama ini tradisi dan modernisasi senantiasa dipertentangkan akibat pengaruh konsep Barat yang memetakan modernisasi membentur tradisi. Sementara pemikir neomodernis berpandangan bahwa modernisasi merupakan mata rantai dengan tradisi, sehingga ada upaya mengintegrasikan tradisi dengan modernisasi. Hal ini sesuai dengan diktum yang selama ini berlaku di kalangan pesantren itu sendiri, yaitu “memelihara hal-hal baik yang telah ada, sambil mengembangkan hal-hal baru yang lebih baik” (*al-muhafazhatu ala al-qadimi ash-shalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah*). Istilah memelihara hal-hal baik yang telah ada (*al-muhafazhatu ala al-qadimi ash-shalih*) adalah refleksi dari tradisi, sedang istilah mengembangkan hal-hal baru yang lebih baik (*al-akhzu bi al-jadid al-ashlah*) adalah refleksi dari penerimaan modernisasi.

Konsep dinamisasi pesantren modern yang di usung oleh Gus Dur terkait dengan dua hal yaitu regenerasi pimpinan yang sehat serta rekonstruksi bahan ajar.⁷⁸ Pergantian pemimpin secara bertahap dan teratur, memungkinkan penumbuhan nilai-nilai baru dalam kehidupan pesantren secara konstan. Menurut Gus Dur sudah saatnya pesantren menyertakan pimpinan muda dalam proses kepemimpinan pesantren. Sebab hal itu akan mampu menciptakan perpaduan

⁷⁸ Wahid, op.cit. hlm.63.

antara kebutuhan-kebutuhan praktis akan kemajuan (terutama materiil) dan antara tradisi keagamaan yang mereka warisi dari generasi sebelumnya.

Selanjutnya prasyarat utama bagi suatu proses dinamisasi berluas lingkup penuh dan dalam adalah rekonstruksi bahan-bahan pengajaran ilmu agama dalam skala besar-besaran, baik kitab-kitab kuno maupun buku-buku pengajaran “modern” ala Mahmud Yunus dan Hasbi Ash-Shiddiqi. Yang menurut Gus Dur telah kehabisan daya dorong untuk mengembangkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap ajaran agama serta tidak memperlihatkan watak berkembang. Maka bahan ajar seperti ini harus direkonstruksi ulang dengan tidak meninggalkan pokok-pokok ajaran keagamaan yang diwarisi selama ini.⁷⁹

Adapun prinsip modernisasi Cak Nur terkait dengan dua hal, *pertama* menyuguhkan kembali isi pesan moral yang diemban pesantren kepada masyarakat abad ini begitu rupa sehingga tetap relevan dan memiliki daya tarik.⁸⁰ Sebab tanpa relevansi dan daya tarik itu, kemampuan atau efektifitasnya tidak dapat diharapkan. Sistem tradisional yang ada saat ini boleh saja harus tetap dipertahankan, namun metode-metode dalam proses pendidikan yang diterapkan harus dikemas secara menarik dan rasional, sehingga lebih efektif dalam membentuk pikiran liberal (manusia merdeka), yang terbebas dari kungkungan ideologi yang menindas, konservatif dan cenderung mempertahankan *status quo*. Sebab apabila sistem atau metode pendidikan tidak diperbaharui ke arah yang

⁷⁹ *Ibid*, hlm.64.

⁸⁰ Madji, *Bilik* . . . hlm.115.

rasional, pesantren sebagai sumber nilai dan ajaran agama yang ditekuni pesantren adalah merupakan pengembangan tugas moral akan semakin tidak menarik dan akan kehilangan daya adaptabilitasnya dengan realitas sosial.

Kedua, menempatkan kembali ilmu pengetahuan dan teknologi dalam daerah pengawasan nilai agama atau moral dan etika.⁸¹ Menguasai dan mengembangkan dalam pelbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang fungsional, yang saat ini sedang dikuasai oleh Barat. Atau dengan kata lain, bagaimana umat islam , khususnya pesantren, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki spiritualitas, sehingga ia menjadi *rahmat* dan kondusif. Dengan demikian pesantren sebagai lembaga pendidikan dan kemasyarakatan memiliki dua amanat (*duo mission*) yang harus di lakukan serentak dan proporsional yaitu amanat keagamaan atau moral dan amanat ilmu pengetahuan.⁸²

Dalam pada itu keduanya juga mensyaratkan beberapa aspek yang perlu di modernisasi pondok pesantren meliputi sitem pendidikan yang berlaku di pesantren, kurikulum serta kepemimpinan. Aspek-aspek tersebut menurut keduanya penuh dengan kelemahan-kelemahan yang apabila terus dipertahankan tanpa adanya perbaikan akan membuat pesantren semakin tidak mampu mewarnai kehidupan modern, itu artinya ancaman terhadap eksistensi pesantren. Apalagi, ketika disadari bahwa pendidikan merupakan faktor penentu bagi

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, hlm.116.

kemajuan peradaban dan kebudayaan bangsa, maka seiring cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat menimbulkan tuntutan yang semakin tinggi pula terhadap standar pendidikan. Hal ini membuat kelemahan yang ada pada pendidikan pesantren semakin terasa sekali serta mendesak adanya penyelesaian.

Untuk menjawab persoalan ini Gus Dur menawarkan pemasukan sekolah umum dalam sistem pendidikan pesantren. Menurutnya memasukkan sekolah umum ke dalam pesantren akan mendorong penambahan jumlah siswa di pesantren, hal ini disebabkan *pertama*, mayoritas warga pesantren yang tidak belajar di madrasah, akan dapat diserap sekolah umum. *Kedua*, mereka yang selama ini berada dalam persimpangan antara mempelajari ilmu agama di pesantren dan sekolah umum bisa masuk ke pesantren sekaligus masuk sekolah umum yang ada di lingkungan pesantren itu.⁸³ Selain itu, lebih lanjut Gus Dur menjelaskan bahwa tidak semua santri yang belajar di pesantren dapat dicetak menjadi ulama. Untuk itu pesantren diharapkan membuka jurusan-jurusan baru sebagai alternatif guna membekali santri sesuai dengan keahliannya masing-masing. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pesantren memasukkan sekolah umum.

Selain itu menurut Mujamil Qomar melalui lembaga pendidikan umum pimpinan pesantren bisa menempuh kebijaksanaan dari dua jalur; *pertama* para santri dilibatkan dalam pendidikan umum agar bisa melanjutkan ke jenjang

⁸³ Wahid, *Menggerakkan . . .* hlm.67.

pendidikan berikutnya. *Kedua*, siswa-siswa tersebut diwajibkan mengikuti kegiatan pesantren.⁸⁴ Soeparlan Soeryoepratondo dan M. Syarif mengatakan bahwa beberapa pesantren telah mendirikan SMP dan SMA, malahan mungkin juga perguruan tinggi umum dengan mewajibkan murid-murid dan mahasiswanya mengikuti semua kegiatan di dalam pesantren, jadi hidup seperti hari-hari yang lain.⁸⁵

Selanjutnya yang jadi pokok perhatian Gus Dur adalah kurikulum yang berlaku di pondok pesantren. Menurutnya pesantren perlu melakukan perubahan kurikulum yang lebih integrative. Santri perlu diberikan bukan hanya ilmu-ilmu yang terkait dengan ritual keseharian yang bersifat praktis-pragmatis, melainkan juga harus dibekali ilmu-ilmu yang berbau pengetahuan umum. Amin Haedari menjelaskan dalam kaitannya dengan respon keilmuan pesantren terhadap dinamika modernitas, setidaknya terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan. Kuduanya merupakan upaya kultural keilmuan pesantren, sehingga paradigma keilmuannya tetap relevan dengan perkembangan kontemporer. *Pertama*, keilmuan pesantren muncul sebagai upaya pencerahan bagi keberlangsungan peradaban manusia di dunia. *Kedua*, karena pesantren dipandang sebagai lembaga pendidikan, maka kurikulum pengajarannya setidaknya memiliki

⁸⁴ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2009) hlm.99.

⁸⁵ Soeparlan Soeryoepratondo dan M. Syarif, *Kapita Selektta Pondok Pesantren*, (Jakarta: PT. Bayu Berkah,t.t), hlm.26.

orientasi terhadap dinamika kekinian. Karenanya keilmuan pesantren juga penting mengadopsi metode yang dikembangkan ilmu-ilmu sosial.

Selain itu terkait dengan pembenahan kurikulum pengajaran, Gus Dur mengajukan prinsip yang patut diperhatikan dalam penyusunan kurikulum pengajaran, yang diantaranya adalah menghindari pengulangan sepanjang tidak dimaksudkan untuk pendalaman dan perjenjangan, di samping pemberian penekanan pada latihan dan praktik. Dengan upaya semacam ini, pendidikan dapat berlangsung efektif, efisien, dan pemborosan waktu dapat dihindari.⁸⁶

Selanjutnya aspek yang juga mendapat perhatian Gus Dur adalah sistem kepemimpinan pesantren. Menurut Gus Dur kepemimpinan pesantren selama ini lazimnya bercorak alami. Pengembangan pesantren maupun proses pembinaan calon pemimpin yang akan menggantikan pimpinan yang ada belum memiliki bentuk yang teratur dan menetap.⁸⁷ Selain itu watak karismatik juga menjadi penyebab belum menetapnya pola kepemimpinan di pesantren. Dengan kata lain, kharisma adalah keunggulan kepribadian individu yang mengalahkan individu yang lain.

Sebagai sebuah kepemimpinan, sudah barang tentu terdapat kelebihan dan kelemahannya. Disadari atau tidak gaya kepemimpinan karismatik memang diperlukan pada tahap awal perkembangan pesantren. Pasalnya sebagaimana diungkap Sukanto, kepemimpinan karismatik yang paternalistik cenderung

⁸⁶ Wahid, *Menggerakkan . . .* hlm.162.

⁸⁷ *Ibid*, hlm.179.

menunjukkan bobot rasa tanggung jawab kiai yang cukup besar serta perhatian secara pribadi terhadap pengikutnya. Dengan demikian, kiai dapat memberikan perlindungan sebaik-baiknya demi terjaganya persatuan dan kesatuan kelompok masyarakat yang dipimpinnya.

Hal itupun tidak luput dari pertimbangan Gus Dur bahwa bukan berarti gaya kepemimpinan karismatis yang sudah berabad-abad berjalan dipesantren itu harus dihilangkan sama sekali, tetapi menuntut pola kepemimpinan yang lebih direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya. Karisma yang ada, dengan demikian akan diperkuat dengan beberapa sifat baru yang akan mampu menghilangkan kerugian diakibatkan dari gaya kepemimpinan yang hanya mengandalkan “karisma” tanpa disertai *skill*.⁸⁸

Berbeda dengan Gus Dur, Nurcholish Madjid memandang langkah awal pesantren dalam melakukan perubahan dengan memperjelas orientasi pendidikannya. Menurutnya selama ini tidak ada kejelasan orientasi yang ingin di capai oleh pendidikan pesantren. Tidak banyak pesantren yang mampu secara sadar merumuskan tujuan pendidikannya dan menuangkan dalam rencana kerja atau program.⁸⁹ Tujuan yang dimilikinya hanya ada dalam angan-angan. Kondisi ini menurut Cak Nur lebih disebabkan oleh adanya kecenderungan visi dan tujuan pesantren diserahkan pada proses improvisasi yang dipilih sendiri oleh seorang kiai atau bersama-sama para pembantunya.

⁸⁸ *Ibid*, hlm.182.

⁸⁹ Madjid, *Bilik* . . . hlm.6.

Pesantren harus memiliki orientasi yang jelas, kejelasan orientasi akan dapat mengantarkan pesantren pada tujuan. Oleh karenanya, orientasi dapat membuat gerak pendidikan lebih terarah, teratur, dan terencana. A. Malik Fadjar menyarankan, untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang teruji dengan baik, ada beberapa prinsip orientasi strategis dalam mengembangkan pendidikan Islam, yaitu: 1) orientasi pengembangan sumber daya; 2) mengarah pada pendidikan multikulturalis; 3) mempertegas misi dasar *liutammima makarim al-akhlaq* (untuk menyempurnakan akhlak manusia); dan 4) mengutamakan spritualitas watak kebangsaan.

Empat prinsip di atas mewakili empat dimensi yang terjalin secara integral yang menjadi orientasi pendidikan pesantren, yaitu dimensi potensial, dimensi kultural, dimensi etik, dan dimensi spiritual. Hal ini seperti yang diinginkan Cak Nur, menurutnya seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, pesantren dituntut memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk dijadikan acuan dan target yang akan dicapai. Sehingga tujuan pendidikan pesantren dapat membentuk manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam merupakan *weltanschauung* (makna hidup) yang bersifat menyeluruh. Selain itu produk pesantren diharapkan memiliki kemampuan tinggi untuk mengadakan respons terhadap tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu yang ada.⁹⁰

⁹⁰ *Ibid*, hlm.19.

Selanjutnya, sama dengan Gus Dur, Cak Nur juga menyorot kurikulum pesantren sebagai aspek yang perlu di modernisasi. Berdasarkan pengamatan Cak Nur kurikulum yang berlaku di lingkungan pesantren masih di dominasi pelajaran agama, yang bahkan materinya khusus disajikan dalam berbahasa Arab. Sedangkan materi keagamaan tidak digarap secara sungguh-sungguh. Cak Nur membedakan antara istilah materi pelajaran agama dan keagamaan. Menurutnya agama lebih tertuju pada segi formil dan ilmunya saja. Sedangkan keagamaan lebih mengenai semangat dan rasa agama (*religiusitas*). Namun justru semangat dan rasa keberagamaan inilah yang dipelajari sambil lalu, tidak secara sungguh-sungguh. Padahal, menurut Cak Nur justru segi inilah yang akan lebih berfungsi dalam masyarakat zaman modern, bukan fiqh atau ilmu kalamnya, apalagi nahwu-sharaf serta bahasa Arabnya.⁹¹

Senada dengan Cak Nur, Marwan Saridjo dkk. Menyebutkan bahwa pengetahuan-pengetahuan yang paling diutamakan adalah pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan bahasa Arab (ilmu sharaf dan ilmu alat yang lain) dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu syari'at sehari-hari (ilmu fiqh, baik berhubungan dengan ibadah maupun mu'amalahnya).⁹² Di samping itu, kajian kebahasaan dalam kurikulum pesantren terlalu berlebihan pada aspek kognitif, sedangkan pada aspek afektif dan psikomotorik kurang terjelajahi secara proporsional. Kecerdasan pada disiplin

⁹¹ *Ibid*, hlm.100-101.

⁹² Marwan Saridjo et al., *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1982), hlm.30.

nahwu-sharaf belum dapat dimanifestasikan dalam praktek-praktek komunikasi sosial yang efektif.

Abdul Munir Mulkan menambahkan, dengan memperhatikan situasi yang berkembang sekarang dan tentu juga dihadapi pesantren, selanjutnya perlu dikembangkan kemampuan multibahasa sebagai alat utama pengembangan pemikiran. Maka para santri selain memiliki akar tradisi (kitab kuning dan pemikiran klasik) sebagaimana terpelihara selama ini, juga terlibat aktif dan kritis dalam wacana modernitas.

Untuk itulah, tidak salah anggapan Cak Nur, bahwa pesantren yang memenuhi selera masyarakat dalam memasuki era modern saat ini adalah yang dalam penerapan kurikulum pembelajarannya memadukan antara materi khazanah Islam klasik dan pengetahuan keagamaan serta pengetahuan umum.

Selanjutnya aspek yang juga menjadi perhatian khusus Cak Nur adalah aspek kepemimpinan. Senada dengan Gus Dur, menurut Cak Nur aspek kepemimpinan karismatik yang selama ini berlaku di pesantren memiliki banyak kelemahan. Berdasarkan identifikasi Cak Nur beberapa kelemahan-kelemahan yang diakibatkan oleh kepemimpinan individual kiai adalah 1] pola kepemimpinan kharismatik jauh dari unsur demokratis, sebab tidak rasional. Lebih-lebih jika disertai dengan tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyuburkan kharisma seperti adanya gap (jaga jarak) dan ketinggian dari para santri. 2] Personal. Karena kepemimpinan kiai adalah pola kepemimpinan kharismatik, maka dengan sendirinya juga bersifat pribadi atau

personal. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa seorang kiai tidak mungkin digantikan orang lain serta sulit ditundukkan kebawah rule of the game-nya administrasi dan manajemen modern. 3] religio-feodalisme. Seorang kiai selain menjadi pemimpin agama sekaligus menjadi traditional mobility dalam masyarakat feudal. 4] Kecakapan teknis. Karena dasar kepemimpinan dalam pesantren seperti itu maka faktor teknis menjadi tidak begitu penting. Dan kekurangan tersebut menjadi salah satu sebab pokok tertinggalnya pesantren dari perkembangan zaman.⁹³

Meskipun demikian gaya kepemimpinan semacam ini justru yang paling dominan dianut para pengasuh pesantren. Sementara itu, rasionalistik sebagai antonim dari karismatik hanya memperoleh porsi yang sedikit untuk dijadikan sebagai gaya kepemimpinan. Hal ini terbukti dengan tidak adanya satu pesantren pun yang gaya kepemimpinan karismatik pengasuhnya kurang dari 50%, sementara rasionalistiknya lebih dari 50%. Demikian simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan Mastuhu.⁹⁴

Untuk itulah, pola-pola kepemimpinan kiai di pesantren yang selama ini kurang kondusif menghadapi tantangan-tantangan modernisasi perlu diubah menjadi pola-pola kepemimpinan yang lebih responsive terhadap tuntutan

⁹³ Madjid, op.cit.hlm.102-103.

⁹⁴ Penelitian dilakukan di enam lembaga pesantren yang dinilainya mempunyai tipe kepemimpinan yang khas. Keenam pesantren yang dimaksud adalah pesantren Modern Gontor, Pesantren Tebuireng, pesantren Paciran, pesantren Guluk-Guluk, pesantren Blok Agung, dan pesantren Sukorejo. Sedangkan dominasi gaya kepemimpinan karismatik dari keenam pesantren tersebut dapat diurutkan sebagai berikut: 1) pesantren Sukorejo, 2) pesantren Blok Agung, 3) pesantren Guluk-Guluk, 4) pesantren Paciran, 5) Pesantren Tebuireng, 6) pesantren Modern Gontor. Lihat Mastuhu, *Gaya dan Sukses Kepemimpinan Pesantren*, (Jakarta: Jurnal Ulumul Qur'an, 1990) vol.II, no.7, hlm.88.

zaman. Namun kekuasaan penuh yang dimiliki kiai tidak mesti di reformasi total. Pandangan ini disampaikan Iik arifin noor dalam pengantar buku Intelektual Pesantren, pada dasarnya kyai memang lamban dan bersahaja dalam dalam merespon perubahan. Namun, perjalanan panjang kyai telah menjadikannya berhati-hati dalam mendukung hal-hal yang baru. Kemudahan yang diberikan kyai untuk masuk di pendidikan pesantren membuat keterlibatan semua masyarakat menjadi mungkin. Kekuatan kyai dan pesantrennya tetaplah penting untuk menempatkan persolan ini kedalam konteks perubahan yang sangat cepat dan globalisasi dunia dimana kita hidup sekarang ini. Kyai senantiasa relevan bukan karena kebajikan dari simbol- simbol itu atau institusi-institusi fisik yang dibuat dalam menerjemahkan nilai- nilai dan norma keagamaan, bukan pula dalam memelihara spritualitas atau intelektualitas, yang jelas apa yang telah ia berikan tidaklah tabu dan statis.

Untuk itu, gaya-gaya kepemimpinan yang diharapkan terwujud diantaranya mengarah pada tipe kepemimpinan yang professional. Cak Nur menyebutnya sebagai kepemimpinan yang *legitimate*, sah menurut ukuran- ukuran pesantren untuk memimpin proses perubahan pada pesantren.⁹⁵ Selain itu, yang juga tidak kalah pentingnya Cak Nur menyertakan *skill* atau keahlian sebagai pra-syarat bagi seorang pemimpin pesantren.⁹⁶ Hal ini penting sebab

⁹⁵ *Ibid*, hlm.109.

⁹⁶ *Ibid*.

berhubungan dengan kemampuan si pemimpin untuk bisa memanager seluruh persoalan sehingga dapat dibuat skala prioritas pemecahannya, kemudian dapat dituangkan dalam rencana kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian pesantren memiliki pemimpin yang visioner dalam menatap masa depan sehingga orientasinya tidak melulu pada kecakapan ibadah, tetapi juga kecakapan fungsional dalam menghadapi tantangan-tantangan baru.

